



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI SENIN, 25 MARET 2013



DAFTAR ISI

Infrastruktur Pelabuhan	1
Infrastruktur Jalan	2
Jalan Tol Batam	3
Ekonomi	4
Pengelolaan Blok Mahakam	5 – 6
Air Bersih	7
PT. INKA	8



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☒ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
131 Pelabuhan Selesai Dikembangkan 2014	<div>- Perbaikan dan pembangunan pelabuhan itu sejalan dengan Rencana Induk MP3EI</div> <div>- 131 pelabuhan yang akan diperbaiki dan dibangun untuk tahun 2013 dan 2014, ada 108 pelabuhan terletak di Indonesia timur</div> <div>- Sejauh ini, keluhan masalah pelabuhan bukan sekadar fasilitas yang masih minim, tetapi juga biaya tinggi</div>					

INFRASTRUKTUR

131 Pelabuhan Selesai Dikembangkan 2014

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 131 pelabuhan yang ada di Indonesia akan selesai perbaikan dan pengembangannya hingga akhir 2014. Dengan demikian, akan ada 165 pelabuhan yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi karena ada 34 pelabuhan telah dikembangkan pada tahun 2012.

Menurut Menteri Perhubungan EE Mangindaan, perbaikan dan pembangunan pelabuhan itu sejalan dengan Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) program pembangunan prasarana; pelabuhan dan bandara, untuk membangun konektivitas sekaligus menjamin keselamatan dan keamanan transportasi. "Pelabuhan yang disiapkan sebagian besar berada di Indonesia Timur," kata Mangindaan kepada pers di Jakarta, pekan lalu.

Dia menyebutkan, dari 34 pelabuhan yang selesai diperbaiki dan dibangun tahun 2012, 28 di antaranya berada di Indonesia timur. Sementara dari 131 pelabuhan yang akan diperbaiki dan dibangun untuk tahun 2013 dan 2014, ada 108 pelabuhan terletak di Indonesia timur.

Menurut Mangindaan, peningkatan kapasitas pelabuhan dan pembangunan pelabuhan baru ini juga untuk mengiringi asas kabotase (*cabotage*/hak kelola) yang telah menyuburkan pelayaran di Indonesia. Inpres Nomor 5 Tahun 2005 yang memuat asas kabotase, membuat Pelayaran Nasional Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.



Rasanya tidak adil jika saudara-saudara kita yang di Indonesia timur harus membayar lebih mahal untuk barang yang sama daripada kita yang ada di Indonesia barat.

Susilo Bambang Yudhoyono

Jika pada Maret 2005 jumlah kapal laut yang berbendera Indonesia masih sebanyak 6.041 kapal, maka pada Januari 2013 jumlah kapal berbendera Indonesia telah tumbuh pesat menjadi 11.961 kapal atau mengalami kenaikan 98 persen.

"Demikian pula untuk *sharing* muatan nasional yang tahun 2005 hanya 61,3 persen, tahun 2012 telah meningkat menjadi 98,85 persen. Sementara untuk *sharing* muatan ke luar negeri juga telah mengalami pertumbuhan, yaitu dari tahun 2006 sebesar 5,7 persen menjadi 9,8 persen pada 2012," ujar dia.

Dengan kondisi pelabuhan yang baik dan pelayaran yang ramai, diharapkan angkutan logistik dapat merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi disparitas harga yang sangat jauh antara

Indonesia barat dengan Indonesia timur.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam peresmian Ground Breaking Pembangunan Pelabuhan New Priok Kalibaru pada Jumat (22/3), mengatakan, target MP3EI tidak hanya membuat pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia, tetapi juga akan mengurangi kesenjangan, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.

"Rasanya tidak adil jika saudara-saudara kita yang di Indonesia timur harus membayar lebih mahal untuk barang yang sama daripada kita yang ada di Indonesia barat," kata Presiden.

Sejauh ini, keluhan masalah pelabuhan bukan sekadar fasilitas yang masih minim, tetapi juga biaya tinggi. Seperti pernah dikeluhkan Wakil Ketua Umum Indonesian Shipowners' Association (INSA) Asmary Herry, belum lama ini, bahwa biaya angkutan laut di pelabuhan yang besar antara lain, biaya pengiriman melalui peti kemas 20 kaki rute Tanjung Priok, DKI Jakarta, ke Belawan, Sumatera Utara. Biayanya berkisar antara Rp 5 juta-Rp 6 juta per peti kemas. "Dari ongkos sebesar itu, katanya, sebanyak 60 persen habis di pelabuhan," kata Asmary.

Menurut dia, kemungkinan biaya logistik akan turun jika tarif dan biaya pelabuhan lainnya dapat dipangkas. "Di Pelabuhan Belawan, tarif justru naik," tutur Asmarv. (ARN)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☒ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
April, 100 Km Jalan di Bekasi Diperbaiki	<div>- Perbaikan jalan tahun ini tersebar di 23 Kecamatan dan 182 desa</div> <div>- Titik perbaikan yakni Jalan Inspeksi Kalimalang sebelah selatan mulai perbatasan Kota Bekasi hingga Tegaldanas, Cikarang Pusat</div>	2013		Rp. 260 miliar	Pemkab Bekasi	

INFRASTRUKTUR

April, 100 Km Jalan di Bekasi Diperbaiki

BEKASI – Pemkab Bekasi menargetkan perbaikan jalan rusak sepanjang 100 km, dari total kerusakan jalan 400 km. Rencananya, perbaikan jalan rusak mulai dilakukan awal April mendatang dari APBD 2013.

Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi Jamaludin mengatakan, perbaikan jalan tahun ini tersebar di 23 kecamatan dan 182 desa. "Perbaikan tahun ini memang anggarannya sangat minim," katanya kemarin.

Perbaikan jalan sepanjang 100 km itu terbagi dalam 690 kegiatan, termasuk drainase dengan total anggaran Rp260 mi-

liar. Saat ini perbaikan jalan kabupaten itu masuk tahap lelang.

Titik perbaikan yakni Jalan Inspeksi Kalimalang sebelah selatan mulai perbatasan Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi hingga Tegaldanas, Cikarang Pusat. Kemudian jalan yang berada di wilayah Tambun, Cikarang Barat, dan Cikarang Selatan. "Hanya jalan dengan status kabupaten yang diperbaiki," ujarnya.

Selain perbaikan jalan dan drainase, tahun ini juga sudah dialokasikan anggaran Rp5 miliar untuk pembangunan tahap I Jembatan Cipamingkis II di Cibarusah. Untuk tahap II, pembangunan jembatan di anggaran APBD Perubahan dengan be-

saran sama.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mustakim mengakui, perbaikan jalan tahun ini masih kurang dari total jalan rusak. Karena anggaran minim, dia meminta Pemkab Bekasi menggunakan skala prioritas. "Diutamakan jalan rusak yang menyebabkan kemacetan," tuturnya.

Pria bertubuh tambun ini meminta Pemkab Bekasi mempunyai target perbaikan jalan yakni selama dua tahun harus sudah tidak ada yang rusak. Disinggung mengenai Jalan Raya Imam Bonjol, Cikarang Barat yang kondisinya rusak parah, kata Mustakim, dia sterkaitharus terus berkoordinasi dengan

Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut informasi, perbaikan dilakukan Maret namun hingga kini belum juga dilakukan. "Kalau memang kita yang memperbaiki perlu dilihat juga payung hukumnya seperti apa. Itu jalan negara, tanggungjawab pemerintah pusat," tegasnya.

Selain itu, Mustakim menyinggung soal Jembatan Tegaldanas yang berada di atas jalan tol Jakarta-Cikampek. Dia meminta Dinas Bina Marga segera membuat *detail engineering design* (DED) jembatan untuk diusulkan ke PT Jasa Marga. "Harus ada jembatan baru di Tegaldanas," tandasnya.

ab dullah m surjaya



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☒ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Jalan Tol Batam Proyek Sedot Rp. 1,2 Triliun	<div>- Proyek pembangunan jalan tol Batam sudah didesak agar juga dimasukkan dalam percepatan jalan tol trans-Sumatera</div> <div>- Pelabuhan Tanjung Sauh sebagai salah satu proyek koridor MP3EI yang masih dalam proses masuk kedalam FTZ (free trade Zone)</div> <div>- Pembangunan jalan tol ini dikhususkan untuk jalur distribusi bahan baku dan hasil produksi untuk industri bukan untuk penggunaan kendaraan pribadi</div>			Rp. 1,2 triliun	Pemprov Kepulauan Riau	

JALAN TOL BATAM

Proyek Sedot Rp1,2 Triliun

BATAM—Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai keberadaan jalan tol sepanjang 25 kilometer senilai Rp1,2 triliun di Kota Batam perlu direalisasikan demi kelancaran lalu lintas barang industri.

redaksi@bisnis.co.id

Gubernur Kepulauan Riau M. Sani mengatakan pembangunan jalan tol di FTZ (free trade zone) Batam mengalami kemajuan setelah masuk dalam pembahasan di rapat percepatan jalan tol Gubernur se-Sumatra beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, proyek pembangunan jalan tol Batam sudah didesak agar juga dimasukkan dalam percepatan jalan tol trans-Sumatra dari Lampung hingga Aceh.

Proyek tersebut hanya tinggal menunggu penerbitan keputusan Presiden dan ditargetkan dibangun pada tahun ini.

"Proyek jalan tol di Batam masuk

dalam percepatan jalan tol Sumatra. Kami mendesak terus agar ini bisa direalisasikan. Jalan tol di Batam akan dibangun sepanjang 25 km dan Keppresnya selesai tahun ini," ujarnya, Sabtu (23/3).

Selain proyek jalan tol, Gubernur Kepri juga mendesak pemerintah pusat agar sejumlah proyek direalisasikan seperti Jembatan Batam-Bintan menyusul dua investor yakni China dan Korsel yang mencoba masuk menggarap proyek itu.

Kemudian, Pelabuhan Tanjung Sauh sebagai salah satu proyek Koridor MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang masih dalam proses masuk ke dalam FTZ.

Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Mustofa Widjaja mengungkapkan proyek jalan tol tersebut nantinya menghubungkan pusat industri dengan pintu masuk dan keluar bahan baku maupun hasil produksi industri di Batam.

Adapun, rutenya yakni Kawasan Industri Muka Kuning-Bandara Hang Nadim-Pelabuhan Batu Ampar.

SUMBER DANA

Sementara pembiayaannya berasal dari APBN dengan sebesar Rp1,2 triliun untuk menyambungkan tiga titik tersebut sepanjang 25 km.

Skema pendanaannya pun diperkirakan sudah selesai dengan pencairan beberapa tahap. Tahap pertama, menurut Mustofa, diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp400 miliar-Rp500 miliar.

Dia menegaskan pembangunan jalan tol ini dikhususkan untuk jalur distribusi bahan baku dan hasil produksi untuk industri bukan untuk penggunaan kendaraan pribadi. Namun, untuk kendaraan pribadi akan memanfaatkan jalan layang yang berstatus jalan nontol. "Pendanaannya APBN karena penugasan pemerintah. Dan jalan tol ini adalah untuk transportasi barang."

Ketua Kadin Batam Ahmad Ma'ruf Maulana mengungkapkan keberadaan jalan tol di Batam sudah diperlukan agar bisa digunakan industri.

Kebutuhan tersebut mengingat jumlah kendaraan di Batam terus bertambah setiap tahunnya, tetapi tidak pernah ada penambahan jalan baru.

Dengan adanya jalan tol dipastikan akan memudahkan jalur khusus bagi

- ▶ Keppres selesai tahun ini.
- ▶ Rute Muka Kuning-Bandara Hang Nadim-Batu Ampar.
- ▶ Tak berlaku bagi kendaraan pribadi.



- Koridor Trans Sumatra membentang dari Bakauheni hingga Banda Aceh, sepanjang Pantai Timur Sumatra.
 - Panjang total mencapai 1.980 Km.
 - Menghubungkan tujuh kota besar (pusat kegiatan nasional), lima bandara, enam pelabuhan dan Jalur Kereta Bandar Lampung-Palembang.
- Sumber: BISNIS/HUSIN PARAPAT

kontainer peti kemas yang selama ini menggunakan jalan arteri kota bersama dengan kendaraan pribadi.

Namun, Kadin juga mengingatkan pemerintah agar serius dalam merealisasikan proyek ini dan jangan sampai berhenti karena minimnya anggaran.

"Pengusaha butuh jalan tol untuk kontainer peti kemas. Tapi sekali lagi, pemerintah jangan jadikan ini hanya wacana saja," katanya se usai seminar Optimalisasi FTZ Batam, Menarik Investasi Asing Demi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sabtu lalu (23/3). (M17) 2



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☐ Feb

☒ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☒ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Ekspektasi Harga Pacu Produksi	<div><div>- Pertumbuhan hasil panen dan produksi CPO tersebut akan menguntungkan perseroan dalam menyambut tren kenaikan permintaan komoditas kebun tahun ini</div><div>- Peluang penaikan harga sangat terbuka karena tahun ini konsumsi minyak nabati global diperkirakan 187,06 juta ton. Sementara itu konsumsi CPO 54,85 juta ton</div></div>					

EMITEN SAWIT

Ekspektasi Harga Pacu Produksi

JAKARTA—Ekspektasi akan kembali normalnya harga minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil/ CPO*) tahun ini mendorong emiten sawit memacu produktivitas dan luas lahannya.

Surya M. Saputra
surya.saputra@bisnis.co.id

Ranting bisnis Grup Astra di sektor perkebunan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) misalnya. Hingga Februari 2013, Astra Agro

Konsumsi minyak nabati 2013 diprediksi naik 41,5%.

Harga CPO tahun ini diperkirakan naik menjadi US\$1.050/mt.

mencetak pertumbuhan produksi CPO 27,7% menjadi 243.207 ton dari capaian periode sama tahun sebelumnya 190.383 ton. Peningkatan produksi CPO ditopang kenaikan panen tandan buah segar (TBS) 15,1% jadi 831.293 ton. Rata-rata imbal hasil produksi TBS di sejumlah kebun inti mencapai 3,5 ton per hektare (ha), naik 16,1% dari kemampuan panen semula 3,1 ton per ha. "Pertumbuhan hasil panen dan produksi CPO tersebut akan menguntungkan perseroan da-

Produksi & Harga CPO Indonesia		
Tahun	Produksi (juta ton)	Harga (US\$/mt)
2012	26,1	800
2013*	28,8	1.050
Keterangan: * Proyeksi Sumber: Pefindo, 2013		

lam menyambut tren kenaikan permintaan komoditas kebun tahun ini," ujar Rudi Limardjo, Investor Relations Astra Agro di Jakarta, Jumat (22/3). Riset CPO terbaru PT Pefindo mencatat tahun lalu krisis global telah menurunkan permintaan CPO dunia terutama dari India dan China. Kondisi itu memangkas harga CPO pada kisaran US\$800 per metrik ton (mt). Namun, rendahnya harga CPO

mendorong pasar meluas ke sektor biofuel yang menurunkan persediaan. Tahun ini, Pefindo memperkirakan harga CPO naik menjadi sekitar US\$1.050 per mt. Rudi menambahkan peluang penaikan harga sangat terbuka karena tahun ini konsumsi minyak nabati global diperkirakan 187,06 juta ton, naik 41,5% dari 132,21 juta ton. Sementara itu, konsumsi CPO 54,85 juta ton. Namun, produksi minyak nabati utama diproyeksi hanya naik 4%-5%. "Untuk itu, kami sudah menyiapkan dana US\$75 juta untuk pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit dengan kapasi-

tas 2.000 ton per hari." Langkah Astra juga diikuti oleh PT BW Plantation Tbk (BWPT), produsen sawit dengan skala yang lebih kecil. Perseroan menargetkan total produksi TBS tahun ini tumbuh 25% menjadi 756.000 ton. "Memang, *yield* produksi kami prediksi turun jadi sekitar 18 ton per ha. Namun, kami diuntungkan dengan bertambahnya kapasitas tanaman menghasilkan," kata Sekretaris Perusahaan BW Plantation Kelik Irwantoro.

A Sanctuary for Business & Leisure Travelers

PADJADJARAN SUITES

Hotel & Conference

www.padjadjaransuites.com

Jl. Raya Pajajaran No. 17 - Bogor 0251- 835 9000



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<input type="checkbox"/> Jan	<input type="checkbox"/> Feb	<input checked="" type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Apr	<input type="checkbox"/> Mei	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Agt	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Okt	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Des																			

2013

<input type="checkbox"/> Kompas	<input type="checkbox"/> Media Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Bisnis Indonesia
<input type="checkbox"/> Republika	<input type="checkbox"/> Sinar Harapan	<input type="checkbox"/> Suara Pembaruan	<input type="checkbox"/> Pikiran Rakyat
<input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka	<input type="checkbox"/> Seputar Indonesia	<input type="checkbox"/> Investor Daily	<input type="checkbox"/> Kontan
<input type="checkbox"/> Suara Karya	<input type="checkbox"/> Neraca	<input type="checkbox"/> Jurnal Nasional	<input type="checkbox"/> Indopos
			<input type="checkbox"/> Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Opsi Mana yang Dipilih Pemerintah?	Pemerintah cenderung ingin memberikan perpanjangan kontrak Negara berpotensi mendapatkan dana segar dalam jumlah besar Pertamina masih memiliki banyak kekurangan dan tak sekelas dengan Total					

► KONTRAK PENGELOLAAN BLOK MAHAKAM

Opsi Mana yang Dipilih Pemerintah?

Blok Mahakam merupakan lapangan penghasil gas di Kalimantan Timur yang produksinya saat ini kurang lebih mencapai 30% produksi gas nasional.

Pri Agung Rakhmanto
Dosen FTKE Universitas Trisakti Pendiri
Reforminer Institute

Kontrak pengelolaan Blok Mahakam ditandatangani pada 1967, berlaku untuk masa 30 tahun. Pada 1997, kontrak diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun. Kontrak akan berakhir pada 2017.

Selama periode itu, Blok Mahakam dioperasikan dan dikelola oleh Total sebagai operator dan mitranya, Inpex, dengan kepemilikan hak partisipasi masing-masing 50%.

Menjelang kontrak berakhir, seperti biasa, muncul permasalahan klasik. Di satu sisi, pemerintah cenderung ingin memberikan perpanjangan kontrak kepada Total sebagai operator dengan Inpex dan Pertamina sebagai mitranya.

Di sisi lain, beberapa kalangan menginginkan agar kontrak tidak diperpanjang, hak pengelolaan dan operator diberikan kepada Pertamina menggantikan Total.

Bilamana diperlukan Pertamina dapat menggandeng Total, Inpex ataupun pihak lain termasuk BUMD sebagai mitranya.

Jika kontrak kembali diperpanjang, hak mengelola dan mengoperasikan Blok Mahakam akan kembali dipegang Total.

Meskipun porsi hak partisipasi Total diturunkan, katakanlah dari 50% menjadi 30%, dengan posisi sebagai operator Total akan dapat kembali menggunakan dan memonetisasi seluruh aset yang ada tanpa harus melakukan penggantian (pembelian) atas aset itu.

Total hanya perlu membayar bonus penandatanganan untuk perpanjangan kontrak yang nilainya biasanya berkisar US\$1 juta-US\$10 juta.

Pemerintah memang dapat saja kemudian menetapkan agar Pertamina mendapatkan porsi tertentu (katakanlah hingga 5%) dalam hak partisipasi pengelolaan, namun kendali operasi dan manajerial akan tetap di tangan Total yang berposisi sebagai operator.

Jika opsi ini yang dipilih, kondisi

sinya relatif tidak akan berbeda dengan apa yang telah berjalan selama ini. Bedanya hanya nantinya Pertamina akan ikut dalam pengelolaan Blok Mahakam, tetapi itu pun tidak secara langsung.



Pertamina akan mendapatkan bagian keuntungan, tetapi juga akan ikut menanggung risiko dan pengeluaran investasi sesuai dengan porsi hak partisipasi yang akan diterimanya.

KONTRAK BERAKHIR

Pada saat kontrak berakhir, maka hak kepemilikan, pengelolaan, penggunaan dan monetisasi seluruh aset Blok Mahakam sepenuhnya kembali kepada negara.

Jika pemerintah kemudian menunjuk Pertamina sebagai operator Blok Mahakam dengan porsi hak partisipasi, katakanlah 51% saja, dan kemudian memonetisasi sisa hak partisipasi yang 49% melalui penjualan yang juga dilakukan Pertamina atas instruksi pemerintah, negara berpotensi mendapatkan dana segar baru dalam jumlah ratusan hingga miliaran dolar AS.

Berapa pun angka pastinya (tergantung negosiasi jual beli), yang jelas jumlahnya akan jauh lebih signifikan dibandingkan dengan sekadar bonus penandatanganan yang diterima pada opsi perpanjangan kontrak.

Dengan posisi pemerintah sebagai pemegang saham penuh Pertamina, ke mana dana segar itu akan

dialokasikan, apakah akan langsung dimasukkan sebagai tambahan penerimaan negara di APBN ataukah akan dijadikan penyertaan modal pemerintah melalui Pertamina atau BUMD, menjadi hak sepenuhnya dari pemerintah.

Dalam opsi ini, kendali operasi, manajerial dan juga pengelolaan risiko investasi akan dipegang Pertamina sebagai operator.

Dengan kebijakan pemerintah, Total dan Inpex juga dapat diberikan prioritas untuk tetap ikut mengelola, meskipun secara tidak langsung karena posisinya beralih menjadi mitra Pertamina.

Melalui porsi kepemilikan hak partisipasi tertentu, Total dan Inpex tetap akan mendapatkan keuntungan dan ikut menanggung sebagian porsi investasi yang akan dikeluarkan.

Gambaran perbandingan kedua opsi yang ada sebetulnya cukup jelas dan sederhana. Maka, cukup mengherankan sebenarnya jika pemerintah masih tetap condong untuk memilih opsi perpanjangan kontrak.

Memilih opsi menunggu kontrak berakhir dan menunjuk Pertamina sebagai operator baru di Blok Mahakam barangkali dipandang lebih berisiko bagi pemerintah. Terutama, berkaitan dengan kemampuan teknologi, finansial, maupun manajerial Pertamina yang memang (masih) sering diragukan.

Dalam ketiga hal itu, mungkin saja Pertamina memang masih memiliki banyak kekurangan dan tak sekelas dengan Total.

Namun, untuk suatu blok migas yang sudah terbukti dan berproduksi hampir selama 50 tahun, tingkat risiko jika Blok Mahakam dikelola dan dioperasikan Pertamina sebenarnya dapat dikatakan masih sangat terukur.

Pertamina juga terbukti mampu meningkatkan produksi Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang diambil alihnya dari BP dari sekitar 21.000 barel per hari pada 2009 lalu menjadi 33.000 barel per hari saat ini.

Satu hal lagi yang lebih mendasar, keberanian mengambil risiko yang terukur adalah faktor utama yang membedakan apakah kita akan sekadar menjadi penonton ataukah menjadi aktor yang diperhitungkan di dunia migas. Jadi, silakan pemerintah memilih. ■

► Pemerintah cenderung ingin memberikan perpanjangan kontrak.

► Negara berpotensi mendapatkan dana segar baru dalam jumlah besar.

► Pertamina masih memiliki banyak kekurangan dan tak sekelas dengan Total.



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<input type="checkbox"/> Jan	<input type="checkbox"/> Feb	<input checked="" type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Apr	<input type="checkbox"/> Mei	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Agt	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Okt	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Des																			

2013

<input type="checkbox"/> Kompas	<input type="checkbox"/> Media Indonesia	<input type="checkbox"/> Koran Tempo	<input checked="" type="checkbox"/> Bisnis Indonesia
<input type="checkbox"/> Republika	<input type="checkbox"/> Sinar Harapan	<input type="checkbox"/> Suara Pembaruan	<input type="checkbox"/> Pikiran Rakyat
<input type="checkbox"/> Rakyat Merdeka	<input type="checkbox"/> Seputar Indonesia	<input type="checkbox"/> Investor Daily	<input type="checkbox"/> Kontan
<input type="checkbox"/> Suara Karya	<input type="checkbox"/> Neraca	<input type="checkbox"/> Jurnal Nasional	<input type="checkbox"/> Indopos
<input type="checkbox"/> Lain-lain,			

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Kontrak Tak Diperpanjang, Total E&P Minta Insentif	<ul style="list-style-type: none">- Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah kontrak akan diperpanjang atau dikembalikan kepada pemerintah untuk dikelola PT. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara- Menanggapi permohonan insentif, SKK Migas mengatakan akan berdiskusi dan mungkin memberikan rekomendasi terkait insentif tersebut- Selama 50 tahun Blok Mahakam dikelola Pihak asing tidak memberikan kontribusi yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah					

► BLOK MAHAKAM

Kontrak Tak Diperpanjang, Total E&P Minta Insentif

BALIKPAPAN—Total E&P Indonesia mengharapkan pemerintah dapat memberikan insentif untuk rencana investasi bila kontrak perusahaan migas asal Prancis tersebut di Blok Mahakam tidak diperpanjang.

Hanum K. Dewi
redaksi@bisnis.co.id

VP Coordination Total E&P Indonesia Yoseph Gunawan mengatakan insentif tersebut diharapkan dapat memastikan perusahaan tidak rugi setelah berinvestasi untuk menjaga tingkat produksi blok migas yang beroperasi sejak 1977.

"Insentif untuk memastikan walaupun diputus kontrak pada 2017, Total masih tetap untung. Sampai 2017 kami komitmen dengan rencana dan kami siap berinvestasi untuk melanjutkan performance saat ini," ujarnya, Jumat (22/3).

Seperti diketahui, kontak kerja sama (KKS) Total dengan pemerintah Indonesia di Blok Mahakam akan berakhir pada 2017. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah kontrak akan diperpanjang atau dikembalikan kepada pemerintah untuk dikelola PT Pertamina

sebagai Badan Usaha Milik Negara/Dia pun menjelaskan perusahaan tersebut akan mengeluarkan biaya cukup besar selama beberapa tahun ke depan untuk menjaga produksi migas dari Mahakam yang sebagian sumurnya sudah mulai menua dengan laju penurunan hingga 45% tanpa upaya pencegahan.

SEGERA BERDISKUSI

Menanggapi permohonan insentif tersebut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) mengatakan akan berdiskusi dan mungkin memberikan rekomendasi terkait insentif tersebut.

"Kami akan berdiskusi dan mungkin memberikan rekomendasi untuk pemberian insentif. Tapi ada kemungkinan juga insentif tidak diberikan kalau kontrak diperpanjang," kata Deputy Pengendalian SKK Migas Aussie D.

Gautama.

Dia pun menjelaskan kemungkinan insentif dapat berupa pembebasan pajak (*tax holiday*), pembebasan memenuhi pasokan domestik (*DMO holiday*), dan kredit investasi (*investment credit*).

Keputusan pemberian insentif tersebut ada di tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah rekomendasi SKK Migas.

Head Department Media Relations Total E&P Indonesia Kristanto Hartadi mengatakan nilai pengeluaran sepanjang tahun ini mencapai US\$2,5 miliar, meningkat dibandingkan US\$2,2 miliar pada tahun sebelumnya, yang digunakan untuk menjaga tingkat pro-

Profil Blok Mahakam

Tanda tangan kontrak	: 31 Maret 1967
Cadangan yang telah dieksploitasi	: 13,5 triliun kaki kubik
Sisa cadangan	: 5,7 triliun kaki kubik (Tcf)
Produksi hingga 2011	
Gas	: 2.200 MMscfd
Minyak bumi	: 93.000 barel per hari

Sumber: SKK Migas, ESDM, dilatih

BISNIS/ILUSI PARAPAT

duksi migas.

"Selama setahun ini kami menyiapkan pengeluaran US\$2,5 miliar. Sebagian besar untuk pengembangan dan eksplorasi."

Sementara itu, Ikatan Alumni Keluarga pelajar dan Mahasiswa Kaltim (IA-KPMKT) mendesak pemerintah pusat agar tidak memperpanjang kontrak pengelolaan Blok Mahakam.

"Selama 50 tahun Blok Mahakam dikelola pihak asing tidak memberikan kontribusi yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan tegas Ikatan Alumni KPMKT menyatakan menolak perpanjangan kontrak ladang gas Blok Mahakam oleh pihak asing," ujar Ketua Harian IA-KPMKT Ichwanutaqwa di Samarinda, Minggu (24/3). (K26) 3

► Insentif mungkin berupa *tax & DMO holiday*.

► Keputusan berada di Menteri ESDM.

► Pengeluaran tahun ini diperkirakan US\$2,5 miliar.



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☐ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☒ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
3 Kecamatan Terancam Krisis Air	<div>- Bekasi Utara, Medan Satria dan Bekasi Barat dinyatakan sebagai daerah zona merah cadangan air bersih</div> <div>- Akan dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumur sudah sesuai izin</div> <div>- Walikota bekasi, Rahmat Efendi mengatakan, sudah meminta kepada dinas terkait untuk mengawasi debit air bersih di wilayah Kota Bekasi</div>					

3 Kecamatan Terancam Krisis Air

Cadangan Air Terus Turun

BEKASI Krisis air mengancam tiga kecamatan di Kota Bekasi. Penyebabnya, cadangan air tanah di daerah tetangga ibukota tersebut terus menurun. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya sungai penyedia bahan baku air minum warga yang tercemar.

Ketiga kecamatan tersebut adalah Bekasi Utara, Medan Satria, dan Bekasi Barat. Ketiganya dinyatakan sebagai daerah zona merah cadangan air bersih. Bahkan, tiga wilayah tersebut sangat rawan terhadap kekeringan dan intrusi atau merembesnya air laut.

Kepala BPLH Kota Bekasi Dadang Hidayat mengatakan, saat ini tingkat penemuan muka air di lapisan dalam mencapai 50 meter per tahunnya. Akibatnya, tiga kecamatan rawan air bersih. "Kami sudah hitung beberapa perusahaan yang begitu besar menarik air dari permukaan bawah tanah," katanya.

Kini, Dadang mengaku, sudah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pemanfaatan air tanah terutama untuk kepentingan industri. Nanti, ketika melakukan perpanjangan izin, maka pihak BPLH akan mengurangi sebanyak 10 persen dari jumlah debit air yang diambil pada tahun sebelumnya.

Selain itu, juga akan dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumur sudah sesuai dengan izin. "Industri paling banyak memanfaatkan air, makanya kita terus melakukan pembatasan dan pengecekan. Hal ini dilakukan mengingat cadangan air semakin menipis" katanya.

Beda hal dengan kawasan permukiman berkelas menengah ke atas, Dadang menyarankan untuk tidak mengambil air tanah. Tapi memanfaatkan sumber air dari PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah). "Untuk sejumlah kawasan perumahan disarankan pakai air PAM saja," ucapnya.

Tindakan itu kata Dadang untuk mengingat cadangan air tanah

Industri paling banyak memanfaatkan air, makanya kita terus melakukan pembatasan dan pengecekan. Hal ini dilakukan mengingat cadangan air semakin menipis"

Dadang Hidayat

Kepala BPLH Kota Bekasi

permukaan sudah dangkal di kedalaman 100 meter kubik per hari. Itu dipastikan tidak sebanding dengan kebutuhan konsumsi air untuk warga, yang rata-rata menyedot di kedalaman 18 sampai 20 meter kubik per kepala keluarga.



"Kualitas air tanah di Kota Bekasi masih bagus dan layak untuk di konsumsi" tegas Dadang.

Dadang sendiri tidak mengetahui berapa persisnya jumlah cadangan air tanah dan sampai berapa lama bisa dimanfaatkan. Sebab hal ini terkait banyak faktor, salah satu diantaranya adalah suplay dari sumber-sumber air di daerah yang lebih tinggi.

Soal keberadaan ruang terbuka hijau yang bisa berfungsi sebagai

penampungan air, kata Dadang, Pemkot Bekasi telah melakukan program penghijauan penanaman ribuan pohon.

Sementara itu, Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, sudah meminta kepada dinas terkait untuk mengawasi debit air bersih di wilayah Kota Bekasi. "Kami akan terus awasi penyedotan air yang paling besar. Tentunya pemakaian untuk perusahaan," tandasnya singkat. (dny)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

☐ Jan ☐ Feb ☒ Mar ☐ Apr ☐ Mei ☐ Jun ☐ Jul ☐ Agt ☐ Sep ☐ Okt ☐ Nov ☐ Des

2013

- ☐ Kompas
☐ Republika
☐ Rakyat Merdeka
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia
☐ Sinar Harapan
☒ Seputar Indonesia
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo
☐ Suara Pembaruan
☐ Investor Daily
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia
☐ Pikiran Rakyat
☐ Kontan
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
PT. Inka Bidik Kontrak Rp. 2 triliun	<div><div>PT. Inka gencar mengikuti tender pengadaan kereta baik di dalam maupun di luar negeri</div><div>Perseroan telah menyiapkan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi terbaru untuk pembuatan 60 kereta kelas eksekutif</div><div>PT. Inka menggandeng perusahaan manufaktur Kanada, Bombardier, yang beroperasi di Swedia</div></div>			Rp. 2 triliun	PT. INKA	

PT Inka Bidik Kontrak Rp2 Triliun

MADIUN – PT Industri Kereta Api atau Inka (Persero) membidik kontrak sebesar Rp2 triliun sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut naik 81,8% dibanding 2012 yang hanya Rp1,1 triliun.

Direktur Administrasi dan Keuangan PT Inka Bambang Soenjaswono mengungkapkan, untuk mencapai target tersebut, perseroannya gencar mengikuti tender pengadaan kereta baik di dalam maupun dan luar negeri.

"Nilai kontrak yang cukup besar yaitu untuk pengadaan kereta bandara sebanyak 60 unit kereta senilai Rp800 miliar hasilnya akan diumumkan pada April 2013, kita juga mengikuti tender pengadaan 100 unit bus gandeng Transjakarta tahun ini," ungkap Bambang saat media *workshop* di Kantor Inka, Madiun, Jawa Timur, akhir pekan lalu.

Direktur Utama PT Inka R Agus H Purnomo menyatakan optimistis dapat memenangkan tender pengadaan Kereta Commuter Line Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Keyakinan ini disampaikan setelah Inka diputuskan sebagai peserta tunggal pengadaan 60 unit kereta tersebut. Kendati hanya satu peserta, PT Inka masih harus melawati sejumlah tahapan termasuk evaluasi teknis.

Agus mengatakan, perseroan telah menyiapkan sejumlah sumber daya manusia (SDM) dan teknologi terbaru untuk pembuatan 60 unit kereta kelas eksekutif itu. Guna menyukseskan proyek tersebut, PT Inka menggandeng perusahaan manufaktur Kanada, Bombardier, yang beroperasi di Swedia.

● heru febrianto